

## **Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dalam Perspektif Teori Difusi Inovasi di Lingkungan Mahkamah Konstitusi**

**Elaine Givandra Louisa<sup>1</sup>, Agustinus Rustanta<sup>2</sup>**

Universitas Tarakanita<sup>1,2</sup>

Komplek Billy & Moon, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur 13450

*e-mail: 2023141005@starki.id<sup>1</sup>, e-mail: agusrustanta@starki.id<sup>2</sup>*

### **Abstract**

*Digital transformation in records management is a growing necessity in modern bureaucracy, particularly within the Constitutional Court of Indonesia, which handles a large volume of documents and requires high levels of efficiency and information accuracy. To meet this need, the Dynamic Records Management System (SIKD) has been implemented. However, disparities remain in its adoption across different units. This study aims to analyze the use of SIKD through the lens of Rogers' Diffusion of Innovation Theory, focusing on five key innovation characteristics: relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability. A qualitative case study approach was employed, using in-depth interviews, direct observation, and document analysis with four informants directly involved in the implementation of the system. Data were analyzed thematically through data reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings reveal that the adoption of SIKD is influenced by its relative advantage in improving document retrieval efficiency, a lack of compatibility across work units, perceived complexity among users unfamiliar with digital systems, limited opportunities for pilot testing, and observable benefits mainly in units that actively utilize the system. Major barriers include inadequate technical training, user resistance, and infrastructural constraints such as unstable internet connections, insufficient hardware, and limited server capacity. Therefore, to ensure wider and more effective adoption of SIKD in dynamic records management, it is essential to strengthen infrastructure, enhance organizational support, and implement clear internal policies that promote digital transformation.*

**Keywords:** *Dynamic Archival Information System, Constitutional Court, records digitization, innovation characteristics*

### **Abstrak**

Transformasi digital dalam pengelolaan arsip menjadi tuntutan di era birokrasi modern, termasuk di Mahkamah Konstitusi yang memiliki volume dokumen tinggi dan kebutuhan akan efisiensi serta akurasi informasi. Untuk itu, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah diimplementasikan, namun masih ditemukan kesenjangan dalam pemanfaatannya di berbagai unit kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan SIKD dengan menggunakan kerangka teori difusi inovasi, khususnya lima karakteristik inovasi menurut Rogers, yaitu keunggulan relatif kesesuaian, kompleksitas, kemampuan diuji coba, dan kemudahan diamati. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan yang terlibat langsung dalam implementasi sistem. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa adopsi SIKD dipengaruhi oleh lima karakteristik inovasi, yaitu keunggulan relatif dalam efisiensi pencarian arsip, kompatibilitas yang belum merata antar unit kerja, kompleksitas penggunaan bagi sebagian pegawai, keterbatasan uji coba sebelum implementasi menyeluruh, serta manfaat yang baru, tampak pada unit yang aktif menggunakan sistem. Diperlukan strategi penguatan kapasitas, peningkatan infrastruktur, dan dukungan organisasi yang konsisten untuk mempercepat adopsi SIKD dalam pengelolaan arsip dinamis.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi Kearsipan Dinamis, Mahkamah Konstitusi, digitalisasi arsip, karakteristik inovasi

## PENDAHULUAN

Fungsi manajemen arsip dinamis pada instansi pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan informasi persuratan, sebelumnya dilakukan secara manual, yang dirasakan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan informasi yang cepat dan efisien. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume data yang harus dikelola serta kebutuhan untuk akses yang cepat dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat (Utami et al., 2024). Perubahan ini seiring dengan perkembangan era Industri 4.0, yang ditandai dengan pesatnya kemajuan dalam teknologi informasi dan kecerdasan buatan, yang memungkinkan pertukaran informasi menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Di tengah persaingan yang semakin ketat dalam dunia digital, komunikasi yang terstruktur menjadi semakin penting bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Era ini memaksa banyak instansi untuk beradaptasi dengan cara-cara baru dalam pengelolaan informasi, terutama dalam pengelolaan arsip (Tahwali et al., 2025).

Revolusi Industri 4.0, yang pertama kali diperkenalkan di Hannover Fair pada tahun 2011, membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Teknologi-teknologi baru, seperti *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan sistem otomatisasi telah mengubah cara kerja organisasi, termasuk dalam cara mereka mengelola arsip. Di Indonesia, sektor pemerintahan juga tidak terkecuali dari perubahan ini, dengan banyak instansi yang mulai mengadopsi teknologi untuk memudahkan pengelolaan arsip dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan teknologi dalam sistem kearsipan ini memungkinkan instansi untuk mengelola arsip secara lebih cepat, lebih mudah, dan lebih aman. Penerapan teknologi ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arsip tetapi juga untuk memberikan kemudahan dalam mengakses arsip yang telah dikelola. Dengan adanya teknologi ini, arsip dapat diakses secara langsung dan lebih transparan, yang mendukung prinsip-prinsip *good governance* (Millenia, 2023).

Salah satu teknologi yang mulai diimplementasikan dalam manajemen arsip dinamis adalah sistem manajemen arsip berbasis elektronik (e-arsip). Sistem ini tidak hanya menggantikan proses manual yang memakan waktu dan tenaga, tetapi juga memberikan solusi untuk masalah penyimpanan arsip yang efisien dan aman. Dengan e-arsip, informasi dapat disimpan dalam format digital, yang memudahkan pencarian dan pengambilan data secara *real-time*. Teknologi ini juga mengurangi risiko kehilangan data atau kerusakan arsip fisik akibat bencana atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, penerapan e-arsip menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam pemerintahan (Ramadhan et al., 2024).

Selain itu, integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam pengelolaan arsip juga memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan akurasi pengelolaan informasi. AI dapat digunakan untuk mengotomatiskan proses klasifikasi dan pengindeksan arsip, yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga manusia yang besar. Teknologi ini dapat mengenali pola dalam data dan mengklasifikasikan arsip secara lebih cepat dan tepat, mengurangi kesalahan manusia. Penggunaan AI dalam sistem kearsipan juga memungkinkan analisis data secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat (Nurdyansa et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi bukan hanya sekadar untuk meningkatkan kecepatan, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Adopsi teknologi dalam manajemen arsip dinamis di sektor pemerintahan diharapkan dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan kolaborasi antar instansi, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Dengan demikian, teknologi akan memainkan peran kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan arsip dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi tersebut melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas yang terus-menerus (Alhadi & Rahmawati, 2024).

Salah satu teknologi yang sangat vital dalam era digital ini adalah *big data*. *Big data* mencakup data terstruktur dan tidak terstruktur yang bisa diperoleh dari berbagai sumber, seperti media sosial, sensor, dan perangkat lainnya. Dengan adanya *big data*, instansi dapat mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. *Big data* juga mendukung penggunaan kecerdasan buatan yang lebih efektif, yang semakin sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik (Sudaryadi et al., 2023; Sugiarto, 2020). Dengan memanfaatkan *big data*, instansi pemerintah dapat lebih cepat menanggapi masalah yang ada, memberikan solusi yang lebih tepat, dan mengelola arsip dengan cara yang lebih efisien. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat yang sangat penting dalam dunia yang semakin terhubung dan bergantung pada informasi.

Namun, kemajuan teknologi juga membawa tantangan berupa disrupsi teknologi. Disrupsi ini dapat menggantikan sistem atau cara-cara lama dengan cara yang lebih efisien dan lebih canggih. Sebagai contoh, teknologi digital dalam pengelolaan arsip menggantikan sistem manual yang lebih lama dan rentan terhadap kesalahan. Hal ini memaksa organisasi dan masyarakat untuk beradaptasi dengan sistem yang baru dan lebih kompleks (Hasim & Mirino, 2023). Dalam hal ini, penerapan teknologi dalam manajemen arsip bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dokumen dan data yang sangat beragam dan terus berkembang.

Surat tetap menjadi salah satu sarana komunikasi yang paling penting di banyak instansi pemerintah, meskipun teknologi terus berkembang dan memunculkan berbagai platform komunikasi baru. Surat tetap memiliki peran yang vital, karena sifatnya yang lebih formal dan dapat dijadikan sebagai bukti hukum dalam banyak situasi. Namun, meskipun penting, pengelolaan arsip surat di banyak instansi sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup, padahal arsip yang baik dapat membantu kelancaran administrasi dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Pengelolaan arsip yang buruk dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan dokumen penting atau bahkan kehilangan data yang dapat merugikan organisasi dalam jangka panjang (Hasim & Mirino, 2023).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengelolaan arsip yang baik dan efisien. Undang-undang ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan administrasi yang efektif dan transparan di seluruh instansi pemerintah (Lathifah et al., 2024). Pengelolaan arsip yang baik diharapkan tidak hanya mempermudah pencarian dokumen, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan pengelolaan arsip yang baik, instansi pemerintah juga dapat mengurangi biaya operasional karena dapat mengakses dokumen dengan lebih efisien dan menghindari kerugian akibat kehilangan dokumen penting. Oleh karena itu, penerapan sistem kearsipan berbasis teknologi menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam menghadapi tuntutan eksternal maupun internal, serta untuk merespons perubahan yang sangat cepat dalam dunia digital ini (Hasan et al., n.d.; Sartika et al., 2020).

Untuk memfasilitasi perubahan ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengadopsi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) yang berbasis digital. SIKD merupakan sistem yang memungkinkan pengelolaan arsip dilakukan secara lebih efisien, transparan, dan aman. Dengan menggunakan sistem ini, pengelolaan arsip di Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih terorganisir. Aplikasi ini juga mendukung upaya reformasi birokrasi yang tengah dilakukan di Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan (Sartika et al., 2020). Penerapan SIKD ini menjadi contoh penerapan teknologi yang mendukung *e-governance* dan mempermudah akses informasi kepada publik.

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, sebagai lembaga pengawal konstitusi, memiliki peran penting dalam menjaga agar semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR sesuai dengan UUD 1945. MK juga bertanggung jawab dalam

menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Sebagai lembaga yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK harus memiliki sistem pengelolaan arsip yang memadai untuk mendukung tugas-tugas konstitusionalnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengandalkan sistem kearsipan manual, melainkan juga mengimplementasikan sistem digital untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan dokumen dan arsip penting yang berkaitan dengan proses persidangan serta pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi ini juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi yang lebih transparan dan dapat diakses publik secara lebih terbuka, sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan pada akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan (Sartika et al., 2020).

Selain itu, dalam rangka menjaga integritas dan kredibilitas lembaga, Mahkamah Konstitusi juga perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan arsip yang digunakan tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga aman dan terjaga kerahasiaannya. Teknologi digital yang diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi memiliki fitur pengamanan yang kuat, yang memungkinkan arsip yang bersifat sensitif dan rahasia tetap terjaga dengan baik. Dalam hal ini, perlindungan data menjadi prioritas utama untuk mencegah akses yang tidak sah atau kebocoran informasi yang dapat merusak citra lembaga dan mengganggu proses konstitusional. Selain itu, pengelolaan arsip yang berbasis digital memudahkan pemantauan dan audit secara berkala untuk memastikan bahwa arsip yang ada tidak hanya lengkap tetapi juga terorganisir dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi di era digital, pengelolaan arsip dalam instansi pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) hadir sebagai solusi dalam meningkatkan efisiensi administrasi serta mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun, meskipun SIKD telah diterapkan di Mahkamah Konstitusi, beberapa tantangan masih dihadapi, termasuk resistensi pengguna, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem SIKD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di Mahkamah Konstitusi melalui perspektif Teori Difusi Inovasi, dengan menyoroti tahapan adopsi, karakteristik inovasi, serta faktor sosial dan organisasi yang memengaruhi penerimaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala serta solusi yang dapat diambil guna mengoptimalkan pemanfaatan SIKD dalam mendukung kinerja administrasi. Untuk memperkuat analisis, hasil temuan akan dibandingkan dengan sejumlah studi sebelumnya yang relevan guna memperoleh pemahaman yang lebih kontekstual tentang adopsi sistem kearsipan digital dalam organisasi pemerintahan.

Penerapan sistem kearsipan digital yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ini sejalan dengan prinsip-prinsip *e-governance* yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan teknologi ini, MK dapat mengakses arsip dengan lebih cepat dan lebih mudah, memfasilitasi kolaborasi antar pegawai dan antarinstansi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang berbasis data. Sistem ini juga membuka peluang untuk meningkatkan transparansi lembaga dengan memungkinkan publik mengakses informasi yang tidak bersifat rahasia secara lebih terbuka dan mudah. Sebagai contoh, keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat dengan cepat dipublikasikan melalui *platform* digital yang terintegrasi, sehingga masyarakat dapat langsung mengetahui hasil dari proses konstitusional yang berlangsung. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi lebih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat, yang semakin penting dalam era digital yang mengedepankan aksesibilitas dan transparansi informasi.

Teori yang digunakan untuk menganalisis penerapan SIKD adalah teori Difusi Inovasi (Rogers et al., 2014). Teori ini menjelaskan bagaimana teknologi baru diterima dan diadopsi oleh individu maupun organisasi dalam masyarakat. Difusi inovasi merupakan proses yang melibatkan

beberapa tahap, seperti pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi, yang harus dilalui agar inovasi dapat diterima dengan baik oleh pengguna.

## KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) di Mahkamah Konstitusi melalui perspektif Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers. Sebelum mengkaji proses adopsi sistem ini, perlu dipahami terlebih dahulu posisi SIKD dalam sistem pengelolaan kearsipan nasional. Di Indonesia, arsip diklasifikasikan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi sehari-hari dan memiliki nilai guna administratif, hukum, keuangan, atau informasi. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan sejak arsip diciptakan hingga tidak aktif digunakan, mencakup pencatatan surat masuk dan keluar, disposisi, pengelompokan, peminjaman, dan penyusutan arsip.

SIKD merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis secara sistematis dan digital. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan akuntabilitas dalam tata kelola surat dan dokumen pemerintahan. Dalam praktiknya, SIKD memungkinkan pengelolaan arsip dilakukan tanpa kertas (*paperless*), memudahkan pencarian dokumen, dan mendukung penghematan ruang serta waktu dalam pelaksanaan administrasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Siregar (2019) yang menyatakan bahwa digitalisasi arsip memberikan manfaat efisiensi penyimpanan, kemudahan akses, perlindungan terhadap bencana, serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan.

Dalam proses difusi inovasi, Rogers mengklasifikasikan penerima inovasi ke dalam lima kategori: *innovators* (inovator), *early adopters* (adopter awal), *early majority* (mayoritas awal), *late majority* (mayoritas akhir), dan *laggards* (kelompok tertinggal). Inovator adalah kelompok pertama yang mengadopsi inovasi dan cenderung mengambil risiko tinggi, sedangkan adopter awal memiliki pengaruh sosial yang kuat dan lebih siap menerima inovasi. Mayoritas awal dan akhir lebih berhati-hati dalam mengadopsi inovasi serta cenderung mengikuti keputusan kelompok lain. Sementara itu, laggards adalah kelompok yang paling lambat dalam menerima inovasi, biasanya karena keterbatasan akses terhadap teknologi atau preferensi terhadap metode konvensional (Rogers et al., 2014).

Difusi inovasi juga dipengaruhi oleh lima faktor utama: keuntungan relatif (*relative advantage*), kesesuaian dengan nilai atau pengalaman yang ada (*compatibility*), kompleksitas dalam penggunaan (*complexity*), kemungkinan untuk diuji coba (*trialability*), dan kemudahan untuk diamati manfaatnya (*observability*). Inovasi yang lebih mudah digunakan, memiliki manfaat yang jelas, dan sesuai dengan kebiasaan yang ada cenderung lebih cepat diterima. Dalam konteks penelitian ini, SIKD sebagai inovasi teknologi komunikasi dalam pengelolaan arsip digital di Mahkamah Konstitusi dianalisis berdasarkan faktor-faktor tersebut untuk memahami bagaimana sistem ini diadopsi oleh pegawai.

Penelitian ini juga mengamati penggunaan SIKD dalam keseharian kerja pegawai. Dalam konteks penelitian ini penggunaan SIKD merujuk pada bagaimana sistem ini dimanfaatkan oleh pegawai dalam berbagai aktivitas, seperti berbagi informasi, mengelola dokumen, serta mendukung proses administrasi. Penggunaan SIKD dapat diukur berdasarkan empat aspek utama:

1. Durasi – Lamanya waktu yang digunakan dalam mengoperasikan sistem.
2. Frekuensi – Seberapa sering sistem ini digunakan dalam aktivitas kerja sehari-hari.
3. Tujuan – Sasaran yang ingin dicapai dengan pemanfaatan sistem.
4. Motivasi – Faktor pendorong individu dalam mengadopsi dan menggunakan sistem ini.

Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini berusaha mengidentifikasi tantangan dalam implementasi SIKD serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan adopsinya di Mahkamah Konstitusi. Keberhasilan penerapan sistem ini bergantung pada kesiapan teknologi, dukungan organisasi, serta strategi sosialisasi yang efektif agar inovasi ini dapat diterima secara luas dan dimanfaatkan secara optimal.

Terdapat banyak penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini. Utami et al. (2024) menemukan bahwa penerapan sistem kearsipan digital di Kabupaten Kendal menghadapi kendala infrastruktur dan kompetensi SDM. Hal ini didukung oleh penelitian Tahwali et al. (2025) yang menunjukkan bahwa resistensi pengguna menjadi hambatan utama dalam adopsi SIKD di Sulawesi Tengah. Millenia (2023) mengungkapkan bahwa keterbatasan pelatihan teknis dan jaringan yang tidak stabil menghambat implementasi sistem di Pekanbaru. Selanjutnya, Sudaryadi et al. (2023) mengusulkan pengembangan fitur notifikasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip digital di Universitas Jenderal Soedirman. Hasil penelitian Hasim & Mirino (2023) menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dan pengawasan menyebabkan rendahnya efektivitas sistem kearsipan digital di Biak Numfor. Fahrianta et al. (2021) menemukan bahwa kepuasan pengguna sangat dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan sistem. Supriyanto et al. (2022) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan sistem informasi kependudukan di Banyumas. Sementara itu, Fahlavi (2018) mengungkapkan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi faktor kunci keberhasilan sistem informasi perencanaan pembangunan di Aceh Besar.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan sistem informasi kearsipan digital di lingkungan pemerintah. Misalnya, Utami et al. (2024) mengungkap hambatan infrastruktur dan pelatihan SDM di Kabupaten Kendal, sedangkan Millenia (2023) menyoroti keterbatasan jaringan sebagai faktor penghambat di Pekanbaru. Namun, kajian yang secara spesifik mengupas pengaruh karakteristik inovasi terhadap adopsi SIKD di lembaga konstitusi seperti Mahkamah Konstitusi masih terbatas. Padahal, lembaga tersebut memiliki kompleksitas organisasi dan budaya kerja tersendiri yang bisa berdampak terhadap keberhasilan adopsi teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana kelima karakteristik inovasi menurut Rogers memengaruhi adopsi SIKD oleh pegawai di Mahkamah Konstitusi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian. Studi ini dilakukan pada Januari hingga Mei 2025 dengan lokasi penelitian di Mahkamah Konstitusi karena lembaga peradilan yang membutuhkan sistem pengarsipan digital yang aman, terintegrasi, dan efisien. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, berdasarkan data internal, keseluruhan populasi pegawai Mahkamah Konstitusi terdiri dari 253 orang pegawai yang secara aktif berinteraksi menggunakan SIKD. Dari populasi terbatas tersebut, dipilih empat informan kunci yang memiliki peran paling relevan, pengalaman langsung, dan pemahaman mendalam terhadap implementasi dan dinamika penggunaan SIKD di lingkungan Mahkamah Konstitusi, yaitu Kepala Subbagian Kearsipan, Arsiparis Senior, Staf Pengelola Arsip, serta Ahli Sistem Informasi.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif terhadap aktivitas kearsipan, dan studi dokumentasi terhadap kebijakan serta regulasi internal yang relevan. Instrumen utama berupa panduan wawancara yang disusun berdasarkan dimensi Teori Difusi Inovasi, yaitu keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemampuan dicoba, dan kemampuan diamati. Teknik analisis data menggunakan pendekatan tematik dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumen, serta melalui *member checking* dengan mengonfirmasi temuan kepada para informan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam penggunaan SIKD sebagai bentuk komunikasi adopsi inovasi sistem informasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dilakukan di lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan utama yang terlibat langsung dalam penerapan SIKD, yakni Kepala Subbagian Kearsipan, seorang Arsiparis Senior, seorang Staf Pengelola Arsip, dan seorang Ahli Sistem Informasi. Berdasarkan wawancara, peneliti mengajukan lima pertanyaan kunci yang diajukan kepada para informan, yaitu: (1) Bagaimana persepsi Anda terhadap manfaat penggunaan SIKD? (2) Apa saja kendala teknis yang dihadapi dalam penggunaan SIKD? (3) Sejauh mana pelatihan dan sosialisasi mendukung adopsi SIKD? (4) Bagaimana dukungan pimpinan terhadap implementasi sistem ini? (5) Bagaimana perubahan perilaku kerja setelah penerapan SIKD?

*Tabel 1: Pertanyaan dan Jawaban Wawancara*

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Persepsi terhadap manfaat penggunaan SIKD	Efisien, cepat, transparan
2	Kendala teknis dalam penggunaan	Koneksi lambat, server tidak stabil
3	Efektivitas pelatihan dan sosialisasi	Pelatihan terbatas dan belum merata
4	Adakah uji coba sebelum penerapan menyeluruh?	Hanya dilakukan terbatas pada beberapa unit kerja sebelum diimplementasikan secara luas
5	Perubahan perilaku kerja setelah penerapan SIKD	Ada peningkatan, tapi masih ada resistensi sebagian pegawai

Untuk pertanyaan pertama, seluruh informan sepakat bahwa SIKD memberikan manfaat signifikan, terutama dalam efisiensi pencarian dokumen dan pengurangan risiko kehilangan arsip. Namun, jawaban atas pertanyaan kedua menunjukkan kecenderungan bahwa infrastruktur teknologi masih menjadi kendala utama. Tiga dari empat informan mengeluhkan lambatnya akses akibat keterbatasan jaringan dan server yang belum optimal. Jawaban atas pertanyaan ketiga menunjukkan bahwa pelatihan belum menyeluruh. Tiga informan menyatakan bahwa pelatihan yang diberikan masih bersifat umum dan tidak menjangkau seluruh pegawai. Dalam hal dukungan pimpinan, seluruh informan menyatakan adanya dorongan positif, tetapi mereka juga menyoroti bahwa kebijakan lebih tegas dan konsisten masih dibutuhkan agar seluruh unit kerja aktif mengimplementasikan sistem ini. Terkait perubahan perilaku kerja, dua informan menyebut bahwa pegawai mulai terbiasa dan merasa terbantu, sementara dua lainnya menganggap masih ada resistensi dari sebagian staf yang lebih nyaman dengan sistem manual.

Proses wawancara di atas mengacu pada panduan berdasarkan dimensi Teori Difusi Inovasi (Rogers, 2014), yang mencakup persepsi terhadap keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, kemampuan dicoba, dan kemampuan diamati dari inovasi.

*Tabel 2: Ringkasan Temuan Teori*

Dimensi Teori	Ringkasan Temuan
Keunggulan relatif	SIKD dinilai lebih efisien dalam pencarian dan penyimpanan arsip dibanding metode manual.

Kompatibilitas	Sistem belum sepenuhnya sesuai dengan kebiasaan dan pengalaman kerja, dan pelatihan yang terbatas membuat adaptasi terhadap sistem menjadi kurang optimal.
Kompleksitas	Sebagian pegawai merasa kesulitan memahami fitur SIKD, karena pelatihan yang diberikan terbatas dan belum menyentuh aspek teknis secara mendalam.
Kemampuan diuji coba	Pengujian terbatas hanya dilakukan oleh beberapa unit kerja sebelum implementasi menyeluruh.
Kemampuan diamati	Manfaat SIKD terlihat jelas pada unit yang aktif menggunakannya (akses cepat, penghematan waktu).

Berdasarkan hasil wawancara dan ringkasan temuan tersebut, kecenderungan jawaban informan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIKD masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis dan perilaku pengguna. Kendala teknis seperti lambatnya koneksi internet, keterbatasan perangkat keras, dan kurangnya kapasitas server menjadi penghambat dalam penggunaan sistem. Di sisi lain, resistensi pengguna terhadap perubahan serta keterbatasan pelatihan teknis yang mendalam turut memperlambat proses adaptasi. Meskipun manfaat SIKD nyata terlihat, terutama di unit kerja yang telah konsisten menggunakannya, upaya peningkatan kapasitas pengguna dan penguatan infrastruktur masih sangat diperlukan untuk memastikan adopsi SIKD yang lebih merata dan efektif dalam pengelolaan arsip dinamis.

### **Pembahasan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa keunggulan relatif SIKD yakni kemudahan pencarian dan penyimpanan dokumen telah diakui oleh sebagian besar informan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat merupakan pendorong penting dalam adopsi inovasi sebagaimana dikemukakan dalam Teori Difusi Inovasi oleh Rogers (2003). Informan menyatakan bahwa pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan risiko kehilangan arsip berkurang, yang menandakan peningkatan efisiensi administratif.

Namun demikian, dimensi kompatibilitas dan kompleksitas masih menjadi tantangan. Beberapa unit kerja belum menyesuaikan prosedur kerja dengan SIKD, dan pegawai yang terbiasa dengan metode manual menunjukkan resistensi dalam menggunakan sistem digital. Ini sejalan dengan temuan Tahwali et al. (2025) yang menyebutkan bahwa resistensi pengguna menjadi hambatan utama dalam adopsi sistem digital di sektor pemerintahan. Dalam konteks ini, perubahan budaya organisasi dan dukungan pimpinan menjadi kunci penting untuk mengatasi hambatan tersebut.

Keterbatasan pelatihan juga menghambat optimalisasi penggunaan SIKD. Sebagian besar pelatihan bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis yang mendalam. Akibatnya, pegawai hanya menggunakan fitur dasar dalam aplikasi SIKD antara lain pencatatan surat masuk dan surat keluar, disposisi surat, pencarian arsip elektronik, pengelolaan peminjaman arsip, serta pelacakan status dokumen. Temuan ini konsisten dengan penelitian Millenia (2023) dan Utami et al. (2024) yang menggarisbawahi pentingnya pelatihan teknis yang komprehensif dalam penerapan sistem informasi kearsipan.

Dari aspek dukungan organisasi, hasil wawancara menunjukkan belum adanya kebijakan internal yang diiringi pengawasan dan evaluasi berkala. Hal ini menyebabkan implementasi yang tidak merata antar unit kerja. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hasim & Mirino (2023) yang menunjukkan bahwa lemahnya regulasi internal dan supervisi berdampak pada rendahnya efektivitas implementasi sistem digital. Tanpa arahan dan pengawasan dari pimpinan, banyak unit yang kembali menggunakan metode manual.

Meskipun terdapat berbagai kendala, penelitian ini menemukan bahwa penerapan SIKD

telah memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan arsip di Mahkamah Konstitusi. Sistem ini memudahkan proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar, disposisi dokumen, peminjaman arsip, serta pelacakan status dokumen yang semuanya merupakan bagian dari arsip dinamis, yaitu arsip yang masih digunakan secara aktif dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Efisiensi pencarian dokumen meningkat, risiko kehilangan arsip berkurang, serta transparansi dalam administrasi menjadi lebih baik. Keberhasilan ini terutama terlihat di unit kerja yang telah menerapkan kebijakan internal yang mewajibkan penggunaan SIKD dan menyediakan pelatihan secara berkala bagi pegawai. Dengan demikian, agar SIKD dapat diadopsi lebih luas, diperlukan upaya yang lebih sistematis, seperti peningkatan kualitas infrastruktur yang mencakup koneksi internet yang stabil, perangkat keras (komputer, *scanner*, dan perangkat pendukung lainnya) yang memadai, serta kapasitas server atau sistem penyimpanan data yang andal, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan kebijakan yang mendukung transformasi digital dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan SIKD di Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dalam kerangka Teori Difusi Inovasi. Keberhasilan adopsi sistem ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk dukungan organisasi, kesiapan teknologi, dan strategi sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap efektivitas SIKD perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan serta mengembangkan strategi yang lebih baik dalam mempercepat difusi inovasi di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 3: Ringkasan faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi SIKD

No	Faktor	Deskripsi	Dampak	Sumber Temuan
1	Persepsi Manfaat ( <i>Relative Advantage</i> )	Pengguna merasakan kemudahan dalam pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan arsip secara digital	Meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi risiko kehilangan arsip	Wawancara, Observasi
2	Kompatibilitas ( <i>Compatibility</i> )	Belum semua unit kerja menyesuaikan prosedur manual ke sistem digital	Menghambat konsistensi implementasi antar unit	Wawancara, Teori Rogers (2003)
3	Kompleksitas ( <i>Complexity</i> )	Sebagian pegawai mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja sistem	Menimbulkan resistensi terhadap penggunaan SIKD	Wawancara, Tahwali et al. (2025)
4	Kualitas Pelatihan	Pelatihan masih bersifat umum dan tidak mendalam secara teknis	Pegawai hanya memahami fitur dasar, tidak memanfaatkan seluruh potensi sistem	Millenia (2023), Utami et al. (2024)
5	Infrastruktur Teknologi	Kendala jaringan dan ketidakcocokan perangkat di beberapa unit kerja	Mengganggu stabilitas penggunaan SIKD dan menurunkan kepercayaan pengguna	Wawancara, Millenia (2023)
6	Dukungan Pimpinan dan Kebijakan	Kurangnya kebijakan internal yang tegas dan pengawasan implementasi	Implementasi berjalan tidak merata dan kurang berkelanjutan	Hasim & Mirino (2023), Wawancara
7	Komitmen Organisasi	Ada unit kerja yang sudah mewajibkan penggunaan SIKD dan menyediakan pelatihan rutin	Implementasi lebih optimal, transparansi dan efisiensi meningkat	Observasi, Wawancara

8	Antarmuka dan Kemudahan Penggunaan	Tampilan sistem dianggap cukup mudah digunakan oleh sebagian pegawai	Mendorong adopsi lebih cepat pada pengguna yang adaptif	Fahrianta et al. (2021), Wawancara
---	------------------------------------	--	---	------------------------------------

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi kearsipan digital. Misalnya, Utami et al. (2024) menemukan bahwa kendala infrastruktur dan kompetensi SDM menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem di Kabupaten Kendal. Selain itu, penelitian Tahwali et al. (2025) menyoroti bahwa resistensi pengguna merupakan tantangan signifikan dalam adopsi SIKD di Sulawesi Tengah, yang juga terlihat dalam penelitian ini, di mana pegawai yang terbiasa dengan metode manual cenderung lebih lambat dalam beradaptasi dengan sistem baru.

Temuan lain yang relevan datang dari Millenia (2023), yang menyebutkan bahwa keterbatasan pelatihan teknis dan jaringan yang tidak stabil menghambat implementasi sistem di Pekanbaru, sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa kendala teknis, seperti stabilitas jaringan dan kompatibilitas perangkat, masih menjadi tantangan dalam penerapan SIKD di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Sudaryadi et al. (2023) mengusulkan pengembangan fitur notifikasi sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan arsip digital, yang dapat menjadi pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengoptimalkan penggunaan SIKD.

Lebih lanjut, penelitian Hasim & Mirino (2023) menunjukkan bahwa kurangnya regulasi dan pengawasan menyebabkan rendahnya efektivitas sistem kearsipan digital di Biak Numfor. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan internal yang kuat serta komitmen pimpinan dalam mendorong pemanfaatan SIKD secara lebih luas di Mahkamah Konstitusi. Sejalan dengan itu, Fahrianta et al. (2021) menemukan bahwa kepuasan pengguna sangat bergantung pada kemudahan penggunaan sistem, yang dalam penelitian ini juga menjadi faktor penting dalam tingkat adopsi pegawai.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi kearsipan tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada dukungan organisasi, kesiapan SDM, dan strategi sosialisasi yang efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan adopsi SIKD di Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan berbagai faktor ini agar sistem dapat diterapkan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi efisiensi administrasi. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan menyeluruh, diharapkan proses transformasi digital dalam pengelolaan arsip di Mahkamah Konstitusi dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh unit kerja.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pengelolaan arsip dengan memberikan kemudahan dalam pengelolaan arsip di Mahkamah Konstitusi dengan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat pencarian dokumen, serta mengurangi risiko kehilangan arsip. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa resistensi pengguna, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pelatihan teknis yang menyeluruh.

Untuk memastikan optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, sosialisasi yang lebih luas, serta kebijakan internal yang mendukung transformasi digital. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan SIKD harus dilakukan agar sistem ini dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini juga menambah wawasan mengenai implementasi sistem kearsipan digital dalam institusi pemerintahan, dengan

menunjukkan bahwa faktor kebijakan internal dan kesiapan sumber daya manusia turut memengaruhi efektivitas adopsi teknologi.

### Rekomendasi

Sebagai langkah tindak lanjut, disarankan agar Mahkamah Konstitusi mengadopsi pendekatan bertahap dalam implementasi SIKD, dimulai dengan *pilot project* di unit tertentu sebelum diterapkan secara luas. Selain itu, diperlukan program sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan pengguna terhadap sistem ini dan guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap SIKD dan mengurangi resistensi terhadap sistem baru. Pengembangan infrastruktur teknologi juga harus diprioritaskan guna memastikan kinerja sistem yang optimal sehingga sistem dapat berjalan dengan optimal tanpa hambatan teknis. Lebih lanjut, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kendala serta peluang perbaikan, sehingga sistem dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kolaborasi dengan instansi lain yang telah berhasil menerapkan sistem serupa juga dapat menjadi strategi yang bermanfaat dalam mempercepat adopsi dan meningkatkan efektivitas SIKD di Mahkamah Konstitusi, penyediaan layanan dukungan teknis yang responsif dan proaktif sangat diperlukan untuk membantu pegawai dalam menyelesaikan kendala teknis yang mungkin dihadapi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alhadi, M., & Rahmawati, R. (2024). Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di Arsip Nasional Republik Indonesia. *ANTASENA: Governance and Innovation Journal*, 2(2), 167–185.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Fahlavi, M. R. (2018). *Implementasi Peraturan Walikota Kediri Nomor 58 Tahun 2011 Tentang Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMPPD)(Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Kediri)*. Universitas Brawijaya.
- Fahrianta, R. Y., Chandrarin, G., & Subiyantoro, E. (2021). *Model Struktural untuk Memprediksikan Kepuasan dan Kinerja Pengguna SIKD pada Organisasi Pemerintah di Kalimantan Selatan Structural Model to Predict Satisfaction and Performance Users of SIKD at Government Organizations in South Kalimantan*.
- Hasan, M. A., Yusralaini, Y., & Irsyadi, F. (n.d.). *Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi terhadap Kinerja Individual dengan Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (Sikd) sebagai Variabel Intervening (Studi pada Skpd di Kabupaten Agam)*. Riau University.
- Hasim, D., & Mirino, Y. (2023). Optimalisasi Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(4), 669–683.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 11(2), 585–592.
- Millenia. (2023). Efektivitas Pelayanan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(15), 403–408.
- Nurdyansa, N., Fatma, F., Erniwati, E., & Amri, N. F. (2024). Pelatihan Digitalisasi Data Administrasi dan Analisis Data Sederhana Menggunakan Google Workspace dan Kecerdasan Buatan Pada Staf Administrasi Universitas Pancasakti Makassar. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(9), 1407–1416.

- Ramadhan, N. D., Guntara, R. G., & Purwaamijaya, B. M. (2024). Perancangan Aplikasi E-Arsip Untuk Data Dosen Di LLDIKTI Wilayah IV. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2135–2143.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 432–448). Routledge.
- Sartika, D., Monita, D. C., & Ilyas, A. (2020). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah (Studi kasus pada BPKAD di Kota Padang). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 22(2), 195–209.
- Siregar, Y. B. (2019). Digitalisasi arsip untuk efisiensi penyimpanan dan aksesibilitas. *Jurnal Administrasi dan Kesekretarisan*, 4(1), 1–19. ISSN 2598-2451.
- Sudaryadi, S., Kurniasih, D., & Tobirin, T. (2023). PELAYANAN TATA PERSURATAN DAN PENJADWALAN PIMPINAN DI REKTORAT UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 11358–11364.
- Sugiarto, A. (2020). Efektifitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Tata Persuratan Elektronik (Paperless Office System)(Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang). *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 6(1), 45–54.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyanto, S., Purnomo, V. D., Kadir, S. A., & Handoyo, B. H. C. (2022). Regional Regulation No. 1 of 2021 Concerning Implementation of Gender Mainstreaming for the Sleman Regional Government. *Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)*, 1(4), 353–366.
- Tahwali, N. R. J., Kalsum, U., Darmawati, D., Hastuty, D., Nawawi, M., & Haryono, D. (2025). EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 144–153.
- Utami, Y., Khairi, H., & Sartika, I. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Pemerintah Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Action Research Literate*, 8, 649–660.